

Sampah Laut Ancam Penghasil Karbon Biru Indonesia

CORAL triangle region Indonesia yang menghasilkan karbon biru berpotensi menjadi *superpower* penyelamat dalam menghadapi krisis iklim dunia. Namun, kawasan dengan luasan hutan mangrove 3,2 juta hektare, padang lamun 3 juta hektare, dan hamparan terumbu karang yang ekstensif itu perlu dijaga dengan mengurangi pembuangan sampah di laut.

“Sampah ke laut ini menjadi predator yang berbahaya kalau masuk ke tiga ekosistem tersebut, hutan mangrove, padang lamun, dan hamparan terumbu karang. Ini akan menyebabkan kerusakan sehingga potensi Indonesia untuk menjadi *superpower* dari karbon biru akan hilang,” kata Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Novrizal Tahar dalam webinar yang diselenggarakan daring, kemarin.

Novrizal mengatakan Indonesia menargetkan mengurangi timbunan sampah ke laut sebanyak 70% pada 2025. Selama tiga tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menurunkan sampah ke laut hingga 15,3%. “Dari yang tadinya total sampah plastik ke laut 615 ribu ton per tahun, menurun 521 ribu ton per tahun pada

2020. Artinya ada progres,” ucapnya.

Novrizal menyatakan rencana jangka panjang antara lain menerapkan pengurangan plastik sekali pakai di kementerian, lembaga, dan perkantoran, meningkatkan dukungan asistensi kepada kepala daerah dan pemda untuk mengelola sampah terpadu dan berkelanjutan, serta memperbanyak kajian analisis pengelolaan sampah darat dan laut.

“Prinsipnya, potensi untuk menjadi *superpower* dengan memanfaatkan tiga hamparan tersebut akan sia-sia kalau kita tidak menjaga wilayah pesisir dan mencegah sampah plastik ke laut,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja mengungkapkan Indonesia memegang 65% zona inti *coral triangle* dunia. Karena itu, Indonesia memiliki cadangan berharga untuk perubahan iklim. “*Challenge* ke depan ialah bagaimana kita bisa memanfaatkan karbon biru secara berkelanjutan. Tantangan yang menarik ialah bagaimana kita bisa menyusun persepsi bersama dan melakukan kolaborasi semua *stakeholder*, baik pemerintah, dunia keilmuan, maupun masyarakat adat,” ungkapnya. (Ata/H-3)